

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP SESUAI SAP PADA
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TIMUR**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

HARVEY PRATAMA PUTRA

NIM : 2012410938

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Harvey Pratama Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 24 Februari 1994
NIM : 2012410938
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Sesuai
SAP pada Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

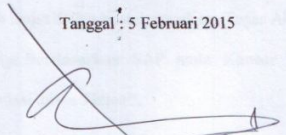
Disetujui dan diterima baik oleh:

Ketua Program Diploma

Dosen Pembimbing

Tanggal : 5 Februari 2015

Tanggal : 5 Februari 2015


Drs. Ec. Mochammad Farid, MM


Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP SESUAI SAP PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

1.1. Latar Belakang

Dasar hukum dari pengelolaan aset tetap dalam neraca adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pengelolaan aset tetap tersebut meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dalam menyusun neraca. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui, hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah termasuk aset budaya atau sejarah, aset kemiliteran dan aset infrastruktur yang memerlukan perlakuan yang spesifik. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap misalnya pengamanan atas aset kurang. Semua permasalahan tersebut terjadi salah satu faktornya dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan yang berpengaruh terhadap neraca atau laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, disusunlah penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan SAP pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur”**.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian, tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dalam memahami perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur serta dapat menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.

2. Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Dapat digunakan sebagai masukan tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tentang akuntansi pemerintahan.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

1.4. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

b. Observasi

Mahasiswa melihat dan melakukan pengamatan langsung mengenai proses kegiatan. Dengan metode ini Mahasiswa dapat memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal – hal yang diteliti.

c. Dokumentasi

Adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen - dokumen yang terkait.

1.5. Subjek Pengamatan

Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Departemen Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Departemen Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

1.6. Ringkasan Pembahasan

Adapun ringkasan pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Perlakuan Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur adalah metode akrual (*accrual basis*). Metode akrual adalah metode akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Keuangan yang digunakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur adalah Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan Aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur diperoleh melalui donasi dan bukan dari donasi. Aset yang berasal dari hibah atau sumbangan dalam bentuk barang dengan menganggap seolah - olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan diperoleh bukan dari donasi adalah melalui pembelian secara tunai atau angsuran.

c. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menggunakan harga perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

d. Pencatatan Aset Tetap

Pencatatan aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menggunakan penyusutan yang menggunakan *software* SIMAK BMN. Penyusutan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun ganda.

e. Penyajian Aset Tetap

Pada laporan keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tidak dibuat laporan laba rugi. Karena kesuksesan organisasi pemerintah tidak diukur dari saldo laba, tetapi dilihat dari mutu pelayanan dan efisiensinya. Sehingga penyajian aset tetap hanya disajikan dengan neraca.

1.7. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perlakuan akuntansi atas aset tetap sesuai SAP pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran – saran yang diberikan pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kanwil Direktotrat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur terus mempertahankan perlakuan akuntansi yang sudah ada sesuai dengan SAP dan mengikuti perkembangan SAP.
2. Apabila sudah dilakukannya penyusutan pada tahun anggaran mendatang, sebaiknya diketahui masa manfaat setiap aset tetap, dan kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap yang nantinya penyusutan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Reeve, James M., et al. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Indonesia. Jakarta: Diterjemahkan oleh Tim Penerbit Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Malang: Penerbit Kementerian Keuangan.
- _____, 2007. Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. (Online).
(<http://lutfi.staff.umm.ac.id/files/2012/06/PSAP-07.ppt> diakses 20 Oktober 2014).
- Martani, et al. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta. Indonesia: Penerbit Salemba Empat.